



## Implementasi Penggunaan Dana Stimulan terhadap Partisipasi Masyarakat pada Program BBGRM di Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat

Dwi Rizka Witria Gewe, Aldri Frinaldi, Asnil

Universitas Negeri Padang

### Abstract

Received: 3 November 2023  
Revised: 13 November 2023  
Accepted: 23 November 2023

*Manunggal adalah suatu sistem pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah, TNI/POLRI dan masyarakat dalam rangka mempercepat proses pembangunan. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah suatu gerakan nasional dalam rangka memperkuat integrasi social, integrasi bangsa dalam rangka memperkokoh keutuhan melalui pemberdayaan dan kelestarian nilai-nilai gotong royong serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Pada implementasi dari program BBGRM Manunggal yang berjalan ini didapati bahwa masih adanya permasalahan pada rendah jumlah partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi terhadap nilai realisasi dan kualitas dari pembangunan infrastruktur yang dijalankan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan Hasil Penelitian tersebut menunjukkan minimnya dana swadaya masyarakat. Kesimpulan yang penulis dapati berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian diatas mendapati bahwa secara umum program BBGRM Manunggal dapat dikatakan berhasil dalam rangka membangun infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun Dana stimulan yang digunakan pada program ini belum bisa dikatakan efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat hal ini dibuktikan dengan kurangnya peran dari masyarakat.*

**Keywords:** *Implementasi, BBGRM, Kelurahan*

(\*) Corresponding Author:

**How to Cite:** : gewe, dwi rizka, Frinaldi, A., & Asnil, A. (2023). Implementasi Penggunaan Dana Stimulan terhadap Partisipasi Masyarakat pada Program BBGRM di. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(23), 219- 227. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10123733>..

## PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, selain sebagai makhluk individu (pribadi) juga sebagai makhluk sosial (zoon politicon). Sebagai makhluk pribadi setiap manusia berbeda dengan manusia yang lain. Meski begitu, karena manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan manusia lain. Demikian juga bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah keluarga besar di dalam rumah bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang masyarakatnya bercorak Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia selalu bergaul dan bekerja sama serta saling bantu membantu antara sesamanya. Sebagai keluarga besar, bangsa Indonesia harus bahu-membahu yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan dan gotong royong harus selalu dikembangkan dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan Bergotong royong merupakan suatu kegiatan yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Pada hakikatnya, kegiatan bergotong royong sudah dilakukan sejak zaman para leluhur kita dilahirkan, mereka

bekerjasama atau bergotong royong untuk sesuatu yang benar-benar memberikan manfaat besar kepada mereka semua. Berbanding terbalik dengan sekarang, masyarakat cenderung hidup sendiri atau mementingkan kepentingan diri sendiri saja dan tidak mementingkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat atau bersama.

Gotong Royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan gotong royong antar masyarakat itu sangat perlu untuk ditanamkan, selain dalam rangka pembangunan juga akan terjalin kebersamaan dalam artian pemberdayaan masyarakat. Karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya persatuan masyarakat dan pemerintah. Dalam menyikapi hal tersebut, Pemerintah Pusat memiliki program nasional yaitu Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). BBGRM ini berlandaskan pada Undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional. Permendagri No 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Dengan adanya Permendagri No 42 Tahun 2005 maka diharapkan nilai-nilai kesatuan masyarakat untuk bergotong-royong ini timbul kembali.

Manunggal adalah suatu sistem pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah, TNI/POLRI dan masyarakat dalam rangka mempercepat proses pembangunan. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah suatu gerakan nasional dalam rangka memperkuat integrasi social, integrasi bangsa dalam rangka memperkuat keutuhan melalui pemberdayaan dan kelestarian nilai-nilai gotong royong serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Maksud dan tujuan pelaksanaan Manunggal BBGRM ini adalah untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju penguatan integrasi social melalui gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, menjaga dan melestarikan budaya gotong royong sebagai budaya asli bangsa Indonesia. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah menjaga dan melestarikan budaya gotong royong sebagai budaya asli bangsa Indonesia, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kemitraan antara masyarakat dalam pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kota Padang sebagai perpanjangan urusan pemerintah pusat, juga ikut melaksanakan Program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Dalam program ini pemerintah memberikan dana stimulan sebagai bentuk bantuan untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di wilayah mereka. Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan Upaya untuk menggelorakan semangat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang berlandaskan keswasayaan sebagai sistem nilai social budaya yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat.

Program BBRGM Manunggal di Kota Padang bertujuan untuk meningkatkan peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses

pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan(Sumaryadi, 2005).

Dalam konteks program BBRGM Manunggal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk mengalokasikan dana stimulan kepada masyarakat dalam rangka sebagai pendorong untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (wilayah) (Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, 1999). Pemerintah Kota Padang harus melakukan pengelolaan APBD secara efektif dan efisien agar dana stimulan dapat digunakan dengan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pembangunan infrastruktur. Melalui undang-undang ini, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya dengan efektif untuk memperkuat infrastruktur transportasi, jaringan komunikasi, energi, air, serta fasilitas publik lainnya, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. (Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014)

Dengan APBD, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana stimulan kepada masyarakat yang terlibat aktif dalam pembangunan. Dana stimulan ini merupakan bantuan dari pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. APBD digunakan untuk memberikan dukungan keuangan kepada masyarakat, yang dapat digunakan untuk membeli material bangunan, peralatan, atau sumber daya lain yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan. Tujuan dari dana stimulan ini adalah untuk membantu masyarakat berkontribusi secara aktif melalui tenaga, waktu, atau sumber daya lainnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Melalui pengelolaan APBD yang efektif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa dana stimulan digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dengan APBD sebagai sumber dana stimulan, BBRGM Manunggal dapat mencapai tujuannya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat yang aktif akan mempercepat proses pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap lingkungan setempat.

Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memberikan panduan kepada Camat dan Lurah dalam rangka pelaksanaan BBRGM ini setiap tahunnya. Dimana setiap kelurahan diberikan dana Rp 35.000.000 untuk melaksanakan kegiatan gotong royong, yang dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Proyek Pokok (Phisik)

Yakni proyek yang benar benar dibutuhkan oleh masyarakat banyak dengan di danai oleh APBD Kota Padang dan bantuan dari swadaya masyarakat dan lembaga lainnya yang bersifat fisik dan non fisik.

## 2. Proyek Tambahan (phisik)

Yakni proyek yang dilaksanakan setelah proyek pokok selesai dikerjakan atau proyek dibuat bersamaan dengan proyek pokok yang sifatnya menunjang penyelesaian proyek pokok atau proyek yang dikerjakan berdasarkan keinginan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi program BBGRM di pemerintah Kota Padang khususnya di Kelurahan Flamboyan Baru tahun 2023 serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan yang timbul akibat kebijakan program ini.

## **METODE**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus uang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah. Data yang dikumpulkan yakni data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya seperti artikel, jurnal, buku dan surat kabar (Moleong, 2015). Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan deduktif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang berisi kutipan – kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. (Moleong dalam Tami & Putri, 2019).

Pengumpulan data secara dilakukan melalui wawancara pada masyarakat Kelurahan Flamboyan Baru dan pemangku kepentingan terkait dengan BPNT. Dalam penulisan ini penulis menggunakan model Implementasi yang dikembangkan oleh George Edrward III sebagai alat analisis, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Surmansyah, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program BBGRM Manunggal telah berhasil dalam membangun dan meningkatkan prasarana bagi masyarakat, yang dapat kita lihat melalui data realisasi dan penyerapan anggaran serta realisasi fisik dari infrastruktur yang dibangun. Dalam laporan pelaksanaan BBGRM Manunggal, terlihat bahwa sebagian besar infrastruktur yang dibangun adalah saluran air dan pengecoran jalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program BBGRM Manunggal telah berhasil dalam membangun dan meningkatkan prasarana bagi masyarakat melalui pembangunan saluran air dan pengecoran jalan, yang

Hubungan antara partisipasi masyarakat dan dana stimulan dimulai selama tahap proses pembahasan usulan pada Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan (Rakorbang) tingkat Kelurahan Flamboyan Baru yang dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Pada tahap ini, setiap usulan dari hasil pembahasan antara pihak LPM tingkat kelurahan dan tokoh masyarakat untuk pembangunan dan pemberdayaan dibahas secara komprehensif. Usulan yang disetujui kemudian dimasukkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Padang Barat untuk dialokasikan anggaran dari APBD dan diteruskan pada Rapar Kerja

Perangkat Daerah tingkat Kota Padang dan dianggarkan untuk kegiatan tahun 2023. Anggaran tersebut akan menjadi dana stimulan dalam pembangunan infrastruktur dan swadaya tersebut. Proses ini mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan dan memberikan sumbangan berupa usulan infrastruktur dan swadaya yang dibutuhkan.

Dalam proses keterlibatan masyarakat, terdapat keterangan dari Kasi PM Kecamatan Padang Timur yang menyatakan bahwa tidak semua masyarakat menghadiri pertemuan perencanaan terkait penggunaan dana stimulan. Hal ini dikarenakan adanya keterwakilan masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam perencanaan tersebut. Keterwakilan ini dapat menjadi faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi langsung dari masyarakat dalam proses perencanaan. Meskipun ada LPM yang mewakili masyarakat, penting untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat secara langsung tetap diperhatikan dan didorong. Upaya perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai peran dan manfaat dari partisipasi mereka dalam perencanaan penggunaan dana stimulan.

Dana yang bersumber dari swadaya masyarakat terdiri dari tenaga goro dan konsumsi, dengan uraian sebagai berikut : (Dalam Rupiah)

Tabel 1.1 Swadaya Masyarakat pada BBGRM  
Kelurahan Flamboyan Baru

<b>Tanggal</b>	<b>Jumlah Tenaga</b>	<b>Harg Satuan Tenaga Goro</b>	<b>Harga Satuan Konsumsi</b>	<b>Total</b>
11-06-2023	1 orang	100.000,-	30.000,-	130.000,-
13-06-2023	-	-	-	-
14-06-2023	1 orang	100.000,-	30.000,-	130.000,-
15-06-2023	-	-	-	-
16-06-2023	1 orang	100.000,-	30.000,-	130.000,-
17-06-2023	1 orang	100.000,-	30.000,-	130.000,-
18-06-2023	-	-	-	-
19-06-2023	1 orang	100.000,-	30.000,-	130.000,-
20-06-2023	-	-	-	-
21-06-2023	1 orang	100.000,-	30.000,-	130.000,-
22-06-2023	1 orang	100.000,-	30.000,-	130.000,-
23-06-2023	2 orang	200.000,-	60.000,-	260.000,-
24-06-2023	1 orang	100.000,-	30.000,-	130.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>10 Orang</b>	<b>1.000.000,-</b>	<b>300.000,-</b>	<b>1.300.000,-</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2023 Program BBGRM dapat dikatakan dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat belum dapat menimbulkan semangat gotong royong pada masyarakat dibuktikan dengan rendahnya nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan.

## 1. IMPLEMENTASI

Dalam penulisan ini penulis menggunakan model Implementasi yang dikembangkan oleh George Edward III sebagai alat analisis, yakni:

### a. Komunikasi

Menurut Turner (2008:5) “Komunikasi adalah proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka”. Komunikasi yang dijalin baik dari Pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu inovasi agar terciptanya kesamaan informasi sehingga apa yang diharapkan pemerintah selaku pelaksana inovasi tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Aparatur Sipil Negara khususnya PSM di Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat terhadap komunikasi kepada masyarakat sudah baik. Dapat dilihat dari dalam rangka menyukseskan program ini Lurah Kelurahan Flamboyan Baru melaksanakan rembug atau bermusyawarah dengan masyarakat Bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua LPM serta Ketua RT dan RW untuk menemukan kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan BBGRM ini dan disepakati lah pelaksanaan BBGRM tahun 2023 di kelurahan Flamboyan Baru di RT 02 RW 01 dengan pelaksanaan Ready mix (cor beton) karena jalanan yang rendah dan selalu becek jika hujan sehingga mengganggu masyarakat jika beribadah ke musholla terdekat, dan air genangan yang dapat menyebabkan penyakit, sehingga masyarakat merasa pelaksanaan ini adalah sesuatu yang penting. Setiap pelaksanaan rangkaian program kegiatan ini ASN Kelurahan Flamboya Baru sudah melakukan penyampaian informasi kepada RT/RW setempat yang sudah baik dan terbuka termasuk dengan masalah keuangan yang akan dipertanggungjawabkan bersama.

### b. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Sumberdaya manusia merupakan masalah yang paling kompleks karena dapat menyebabkan sumber daya lain berfungsi, menciptakan efisiensi, efektivitas dan peningkatan produktivitas (Sanusi, 2014). Berdasarkan hasil wawancara. Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Komunikasi jelas dan konsisten ketentuan-ketentuan atau atura-aturan jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien.

Sumber daya manusia adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaan suatu inovasi. Karena walaupun inovasi tersebut baik namun tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas maka inovasi tersebut bisa dikatakan gagal. Dalam implementasi BBGRM di Kelurahan Flamboyan Baru ASN yang berjumlah 4 (empat) ASN .

Selanjutnya, Salah satu penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan adalah kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh mereka terkait pembangunan infrastruktur. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam proses perencanaan membuat masyarakat menghadapi kesulitan dalam berpartisipasi aktif. Dalam perencanaan, diperlukan kehadiran individu yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan bersama masyarakat, di luar

dari pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa tingkat kompetensi sumber daya yang dimiliki masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana sejenis. (Umaira & Adnan, 2019)

c. Disposisi

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Dalam penerapan implementasi BPNT ini masyarakat cenderung belum mengetahui aplikasi cek bansos sehingga masyarakat merasa kesulitan apabila ingin mengusulkan dirinya untuk menjadi penerima manfaat BPNT. Intensitas disposisi implementor adalah preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor (Subarsono, 2010). Dalam hal ini intensitas disposisi implementor cukup baik dan mendukung terhadap aplikasi ini.

d. Struktur Birokrasi

Koordinasi dengan instansi lain dilaksanakan dalam rangka menjalin kerjasama antar instansi terkait dalam menyukseskan Program ini. Bappeda Kota Padang telah memberikan buku panduan terkait dengan pelaksanaan program ini agar tingkat bawah dapat melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## 2. KENDALA

Dari pelaksanaan wawancara dan observasi penulis lakukan menemukan beberapa kendala terhadap implementasi BBGRM di Kecamatan Padang Barat khususnya Kelurahan Flamboyan Baru. Menurut Hansen dan Mowen dalam (Haksama, 2016) mengelompokkan jenis kendala berdasarkan asalnya menjadi dua yakni kendala internal dan kendala eksternal. Adapun kendala dalam implementasi BBGRM di Kecamatan Padang Barat khususnya Kelurahan Flamboyan Baru, yakni:

a. Kendala Internal

Kendala internal yakni kendala yang dirasakan dari dalam organisasi. Organisasi dalam artikel ini yaitu Pemerintah tingkat Kelurahan. Kendala yang dihadapi dari segi Internal yakni pengetahuan teknis terkait dengan pembangunan infrastruktur sehingga dalam pembangunan yang dilakukan kurang menggunakan ilmu sesuai dengan keadaannya sehingga dalam pelaksanaannya dikemudian hari ditemukan beberapa kekurangan seperti jalanan yang belum berhasil dicor dengan baik serta kendala teknis lainnya, maka hal ini menjadi kendala dan menghambat pelayanan penyaluran kepada masyarakat.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yaitu kendala yang dihadapi dari luar organisasi. Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah dalam hal ini Pihak Kelurahan yaitu dikarenakan BBGRM adalah program dari Pusat sehingga pelaksanaannya terkesan kaku. Padahal BBGRM tidak melulu tentang infrastruktur bisa juga dengan sosialisasi atau kegiatan kemasyarakatan lainnya. Kelurahan Flamboyan Baru yang terletak di Kota yang mana masyarakatnya bersifat individual dan pekerja pagi hingga sore sehingga tidak ada waktu dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan melakukan aktivitas masyarakat Karena sudah sibuk dengan pekerjaan dan rutinitas yang dilakukan

## 3. UPAYA

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini pihak Kelurahan Flamboyan Baru dalam mengatasi kendala yang terjadi yakni dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait dengan Program BBGRM dan dampak dan keuntungan yang akan dirasakan oleh masyarakat akibat dari program ini. Serta memberikan contoh kepada masyarakat, dengan harapan menumbuhkan sawadaya serta partisipasi masyarakat. Dan pemenuhan pelaksanaan kegiatan dilakukan di hari libur kerja sehingga masyarakat yang bekerja di hari kerja dapat ikut berpartisipasi.

Selanjutnya, pihak kelurahan juga melakukan pelaporan kepada Bappeda Kota Padang melalui Kecamatan Padang Barat serta masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan BBGRM diharapkan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kota Padang khususnya Pemerintah Kelurahan Flamboyan Baru. Selanjutnya, masyarakat hendaknya dapat merubah mindset dalam bermasyarakat.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan yang penulis dapat berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian diatas mendapati bahwa secara umum program BBGRM Manunggal dapat dikatakan berhasil dalam rangka membangun infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tahun 2023 di Kelurahan Flamboyan Baru dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat telah berjalan dengan baik dan telah menciptakan kebersamaan, keterbukaan dan kekeluargaan antara Pemerintah Kelurahan dengan LPM, PKK, Masyarakat, RT RW yang berada diwilayah Kelurahan Flamboyan Baru.
2. Dana stimulan yang digunakan pada program ini belum bisa dikatakan efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat hal ini dibuktikan dengan kurangnya peran dari masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur dan juga minimnya dana swadaya yang dikumpulkan dari masyarakat untuk masyarakat. Dana stimulant (swadaya masyarakat) diperuntukan bagi kegiatan manunggal telah dapat menyerap swadaya masyarakat berupa swadaya gotong royong dan konsumsi.

Rekomendasi yang dapat penulis berikan setelah mengamati kegiatan manunggal bulan bhakti gotong royong masyarakat tahun 2023 ada beberapa masukan yang akan berguna untuk peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan BBGRM dimasa yang akan datang sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan pembinaan kepada aparat kelurahan dan LPM agar dapat menetapkan mana skala prioritas kegiatan untuk masa yang akan datang.
2. Perlunya peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi pengurus LPM, RW, RT dan tokoh tokoh masyarakat lainnya dalam menyusun perencanaan pembangunan sehingga aspirasi masyarakat lebih dapat ditingkatkan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah diucapkan kepada Allaah azza wa jalla dan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu menulis dan membimbing dalam proses artikel ini. Terutama kepada keluarga, orang tua , kakak, suami dan anak, rekan ASN

Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang sudah memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penulisan artikel ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

#### **REFERENSI**

- Brown, M. M., & Garson, G. D. (2011). *Public information technology and e-governance: managing the virtual state*. Jones & Bartlett Learning;
- Hamid, S.2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan* : Yogyakarta : Deepublish
- Meiyenti, I. (2020). Implementasi Inovasi E-Kelurahan : Pelayanan Kelurahan Berbasis Elektronik pada Kelurahan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 1(2)
- Maleong, L.J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*: Bandung : PT Remaja
- Mariano, S. (2018). Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo [Thesis, Universitas Airlangga].<http://repository.unair.ac.id/id/eprint/80061>;
- Nazir, M . 2014 . *Metode Penelitian* : Bogor : Ghalia Indonesia
- Novriando, A. (2020). Efektivitas “Jogja Smart Service” Terhadap Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 68–75.
- Subarsono.2015 . *Analisis Kebijakan Publik* : Jogjakarta : Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2014 . *Memahami Penelitian Kualitatif* : Bandung : CV. Alfabeta
- Sumarsyah, W., Jendrius, J., & Putera, R. E. (2021). Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi (Studi Di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Niara*, 13(2), 37-45.